

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS/ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI
KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Eric Diki Milandy

NPP. 29.1873

Asdaf Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ericdmy29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: The health problem that is difficult to handle until now is the problem of the development of the HIV and AIDS virus in Sorong Regency which continues to increase the number of HIV and AIDS sufferers in Sorong Regency. Therefore, the Sorong District Government issued a Regional Regulation on HIV and AIDS Prevention and Control in Sorong District. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the implementation of the Sorong Regency Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning HIV/AIDS Prevention and Control in Sorong Regency, especially in the Sorong Regency Health Office, and to find out what obstacles arise in its implementation. implementation and what efforts are being made. in overcoming existing barriers. **Method:** The research method used is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. Sources of data in this study are primary and secondary data sources. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. Sources of data used are informants. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. **Result:** The results showed that based on the Van Meter and Van Horn theory of the indicators contained in the dimensions of standard and target policies, resources, communication between implementing agencies, characteristics of implementing agencies, social, political and economic environment, and implementing attitudes, namely the occurrence of budget reductions in activities. HIV/AIDS prevention and control due to budget reallocation and lack of support from the community. Efforts that have been made are to carry out careful planning regarding the budget for the HIV/AIDS prevention and control program and also to carry out socialization and education to the public about HIV/AIDS. **Conclusion:** The implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Prevention and Control of HIV/AIDS can be said to have not run optimally marked by the number of HIV and AIDS sufferers in Sorong Regency which has increased in 2021. Based on the results of the analysis that researchers carried out with the Van Meter and Van Horn theories , found one dimension that caused the HIV/AIDS Prevention and Control Policy not to run optimally, namely the resource dimension consisting of budget resource indicators, the occurrence of budget reductions in 2021, due to budget refocusing, which in 2020 the budget will be more issued and focused on activities to handle the COVID-19 virus pandemic, so that the budget obtained in 2021 will be limited.

Keywords: Implementation District Regulation, HIV/AIDS Prevention and Control.

ABSTRAK

Latar Belakang: Permasalahan kesehatan yang sulit dihadapi hingga saat ini yaitu masalah berkembangnya virus HIV dan AIDS di Kabupaten Sorong, yang mana terus terjadi peningkatan terhadap penderita dari virus HIV dan AIDS di Kabupaten Sorong. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Sorong. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Disamping itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam implementasi dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sumber data yang digunakan adalah informan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil Penelitian:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn dari indikator yang terdapat dalam dimensi standar dan sasaran Kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan sikap pelaksana yaitu terjadinya pengurangan anggaran dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS karena terjadinya realokasi anggaran dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan Perencanaan yang Matang Mengenai Anggaran untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai HIV/AIDS. **Kesimpulan:** Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal ditandai dengan jumlah penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Sorong yang mengalami peningkatan di Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dengan teori Van Meter dan Van Horn, menemukan satu dimensi yang menjadi penyebab Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS belum berjalan dengan optimal yaitu dimensi sumber daya yang terdiri dari indikator sumber daya anggaran, terjadinya pengurangan anggaran di Tahun 2021, dikarenakan terjadinya realokasi anggaran, yang mana di Tahun 2020 anggaran lebih banyak dikeluarkan dan difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi virus COVID-19, sehingga anggaran yang didapatkan di Tahun 2021 itu menjadi terbatas.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diera Teknologi begitu canggih seperti saat ini membawa kita untuk lebih maju untuk membangun Negeri. Akan tetapi dengan terus berkembangnya zaman maka semakin banyak permasalahan di Negeri ini yang harus di hadapi, permasalahannya bukan hanya di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum dan sosial saja. Ada banyak permasalahan lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah tetapi diperlukan juga peran dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Permasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah permasalahan tentang Kesehatan, yaitu masalah berkembangnya virus HIV dan AIDS yang menjadi salah satu penyakit yang berbahaya di Indonesia. Di zaman globalisasi seperti saat ini pergaulan sangat tidak terkendali sehingga bisa membuat virus HIV dan AIDS terus berkembang. Kasus terjadinya HIV/AIDS semakin terus menerus bertambah jumlahnya di Indonesia. Kasus HIV yang terus bertambah diakibatkan oleh pengetahuan HIV dan AIDS yang kurang, pergaulan seks bebas dan juga penggunaan narkoba jenis suntik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Papua barat berada pada urutan ke-5 dengan jumlah kasus HIV sebanyak 3.753 orang dan AIDS sebanyak 1.601. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak sekali yang terjangkit penyakit HIV dan AIDS di Provinsi Papua barat. Penyakit HIV dan AIDS sudah menjadi masalah besar penyakit menular untuk wilayah Papua Barat. Karena jumlah kasus yang banyak di Provinsi Papua Barat, menyebabkan Provinsi ini menjadi daerah yang rawan dengan penularan virus HIV dan AIDS. Kabupaten Sorong berada di urutan pertama di Provinsi Papua Barat dan disusul oleh Kota Sorong yang berada di urutan kedua, dan Kabupaten Manokwari yang berada di urutan ketiga. Kabupaten Sorong menjadi wilayah yang dianggap rawan terhadap penyakit HIV dan AIDS. Penduduk Kabupaten Sorong berjumlah 123.172, terdiri dari laki-laki 62.234 dan perempuan 57.398. Jumlah kasus hingga tahun 2021 adalah 1.371, Dapat dikatakan jumlah tersebut mengkhawatirkan. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong mengambil langkah serius untuk memerangi dan mencegah HIV/AIDS.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan sumber inspirasi yang bisa membantu peneliti untuk dapat melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti untuk rujukan penelitian sehingga peneliti mendapatkan berbagai teori yang bisa digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Tujuan dari penelitian sebelumnya yaitu menghindari plagiarisme dengan penelitian ini. Dalam hal penelitian, peneliti mengambil 3 (tiga) penelitian sebelumnya untuk menjadi bahan perbandingan, yakni Jurnal Yani Anggina, Universitas Andalas. Yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan HIV/AIDS di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018”. Penelitian ini merupakan bentuk analisis faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam Penanggulangan HIV/AIDS. Dengan adanya program Penanggulangan HIV/AIDS, dinilai masih kurang dikarenakan kinerja petugas dalam penanggulangan HIV/AIDS yang belum optimal, dan juga kerjasama lintas sektor mengenai penanggulangan HIV/AIDS belum maksimal. Jurnal Ngadnan, Universitas Riau. Yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS”. Dengan adanya peran pemerintah tersebut masih dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga masih ada hambatan-hambatan seperti proses implementasinya masih kurangnya sinergi, sehingga hambatan tersebut menjadi masalah untuk Pemerintah dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Jurnal Endof Pudan Sembiring, Universitas Brawijaya yang berjudul “Implementasi Perda No.14 Tahun 2008 mengenai Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang (Studi tentang Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik)”. Penelitian ini merupakan bentuk kajian dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Dengan adanya kebijakan peraturan daerah tersebut masih dirasa kurang dalam pelaksanaan Kebijakan tersebut sehingga masih ada hambatan-hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari Kebijakan Peraturan Daerah tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada lokus dan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Teori yang penulis gunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu yakni peneliti sebelumnya menggunakan teori implementasi Edward III sedangkan peneliti sekarang menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, dan fokus penelitian sebelumnya yaitu mengarah kepada studi kasus peran komunikasi dalam implementasi kebijakan perda tersebut dan penelitian sekarang fokus kepada bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan penjelasan dari Hardani Ahyar dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara spesifik melalui data primer maupun sekunder yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara sistematis dengan menyiapkan pedoman wawancara terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sorong, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kabupaten Sorong, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sorong, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Sorong, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sorong, Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sorong, Dokter Bidang Penanganan HIV/AIDS Puskesmas Kabupaten Sorong, dan Masyarakat Kabupaten Sorong. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang terdapat dimensi standar dan sasaran Kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan sikap pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deteksi mengenai kasus HIV/AIDS di kabupaten Sorong terus bertambah seiring dengan makin meluasnya jaringan pelayanan dan upaya penemuan dan konseling. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penularan HIV di masyarakat. Pengembangan layanan HIV dan IMS serta perluasan jejaringan dengan mitra terkait termasuk LSM merupakan salah satu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian penulis, yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong bahwa keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdapat dimensi standar dan sasaran Kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, dan sikap pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Suatu tolak ukur dari keberhasilannya sebuah kebijakan di implementasikan adalah dari tujuan dan bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang sudah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik yaitu apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. kasus HIV dan AIDS terus meningkat dari tahun 2013 dengan jumlah pengidap HIV sebanyak 583 orang dan penderita AIDS sebanyak 221 orang selanjutnya terus menaik jumlahnya hingga di tahun 2021 dengan jumlah 905 orang pengidap HIV dan 466 orang penderita AIDS. Pada tahun 2016 Peraturan Daerah Mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditetapkan dan mulai berlaku, Dengan adanya Peraturan Daerah HIV dan AIDS sampai saat ini belum dapat menurunkan angka pengidap dan Penderita HIV dan AIDS dengan Maksimal.

3.2 Sumber Daya

Tercapainya dari suatu proses Implementasi bergantung pada kemampuan memanfaatkannya sumber daya tersebut. Sumber daya adalah salah satu dimensi yang mempengaruhi implementasi. Jika sebuah perintah implementasi dijalankan secara jelas dan konsisten namun sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Sumber daya yang akan mendukung implementasi kebijakan berjalan dengan efektif disini adalah sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Mengenai sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Puskesmas, beberapa Puskesmas di Kabupaten Sorong masih kekurangan pegawai bahkan masih ada banyak Puskesmas yang jumlah pegawainya dibawah angka 10. Mengenai sumber daya anggaran terdapat penurunan anggaran di Tahun 2021, dikarenakan terjadinya realokasi anggaran di Tahun 2020, yang mana di Tahun 2020 anggaran lebih banyak dikeluarkan dan difokuskan untuk kegiatan penanganan virus COVID-19, sehingga anggaran yang didapatkan di Tahun 2021 hanya bisa untuk melaksanakan satu kegiatan yaitu kegiatan deteksi dini penyakit HIV dan AIDS. Mengenai Fasilitas, sarana Kesehatan yang berada di Kabupaten Sorong mulai meningkat dan juga merata pada setiap Kecamatan terutama pada sarana pelayanan Kesehatan dasar untuk masyarakat seperti puskesmas dan juga posyandu. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai ini untuk dapat mendukung dari kebijakan pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong.

3.3 Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Implementasi atau pelaksanaan dalam suatu kebijakan diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi untuk menunjang keberhasilan suatu program kebijakan tersebut. Jika koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat itu baik, maka akan semakin sedikit juga kesalahan-kesalahan yang terjadi. mengenai cara komunikasi antar badan pelaksana untuk dapat menerapkan kebijakan Perda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong yaitu dengan cara berkomunikasi bersama pihak Rumah Sakit dan Puskesmas, selain itu ada rapat-rapat koordinasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sorong yang dimana didalamnya terlibat stakeholder seperti LSM yang non struktural atau bukan formal yang sudah bekerja sama dengan pihak Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sorong. Maka dari itu koordinasi itu bagian yang sangat penting.

3.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Kinerja dari implementasi kebijakan memiliki pengaruh besar dengan ciri-ciri yang sesuai dengan para badan pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan diselenggarakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan juga disiplin pada aturan dan sanksi hukum, seperti halnya kebijakan publik yang memiliki tujuan untuk merubah perilaku dasar manusia. Namun pada konteks lain, diperlukan badan pelaksana yang demokratis dan persuasif. Luasnya suatu wilayah implementasi ada juga perhitungannya yang mana perlu menentukan badan pelaksana. Semakin luasnya cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besarnya pula badan-badan yang perlu dilibatkan. Mengenai peran dari pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dalam pengimplementasian kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Peran dari Pemerintah Daerah sangat responsif, cepat dan tanggap terhadap penderita penyakit HIV/AIDS selain itu peran dari Dinas Kesehatan lebih banyak kegiatan-kegiatan dilapangan dan penjangkauan, bukan hanya melayani kesehatan tapi untuk preventif dan normatif juga bekerja sama dengan institusi atau lembaga lainnya.

3.5 Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Dalam penilaian kinerja implementasi lingkungan yang ada diluar menjadi pendorong kesuksesan suatu kebijakan yang telah disetujui. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak baik menjadi suatu hambatan dari gagalnya kinerja implementasi suatu kebijakan. Untuk itu, harus

memperhatikan kondisi lingkungan yang ada diluar tersebut. Mengenai kondisi lingkungan sosial terkait implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Kondisi lingkungan sosial menjadi hambatan karena masih banyak masyarakat Kabupaten Sorong khususnya anak-anak muda yang tidak begitu peduli dengan penyakit HIV/AIDS ini sehingga kasus angka pengidap masih bermunculan tiap tahun walaupun tidak banyak jumlahnya tetap saja tidak bisa dibiarkan kasus HIV/AIDS ini ada terus. Selanjutnya mengenai dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan elit politik dalam implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, dukungan dari kelompok-kelompok maupun elit sangat banyak mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ini.

3.6 Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan hal yang terakhir yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn, karena sikap pelaksana dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Variabel Sikap Pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk dapat menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi pelaksana juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut. Mengenai sikap pelaksana, sikap pelaksana melakukan yang terbaik salah satunya mementingkan pencegahan karena orang yang tidak terkena HIV/AIDS jangan sampai terkena HIV/AIDS karena masalahnya itu akan besar, penderita akan minum obat seumur hidup, karena obat itupun belum bisa menyembuhkan, tapi dia membuat bagaimana penderita itu bertahan/survive itulah pentingnya pencegahan, juga memberikan pelayanan terapi ART untuk mengobati penderita, dan selain itu harus memiliki keahlian sebelum turun kelapangan karena sikap pelaksana itu berjuang yang terbaik berusaha untuk tetap menemukan, mengobati, dan mempertahankan sampai sembuh.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu strategi kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam menanggapi permasalahan HIV/AIDS yang mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat didunia khususnya di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya di lapangan peneliti menemukan bahwa masih didapatkan hambatan dalam penerapan kebijakan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dalam pelaksanaan kegiatan pengimplementasian kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, sumber daya anggaran masih menjadi kendala, karena banyak kegiatan yang membutuhkan dana, seperti pengobatan, layanan konseling, deteksi dini HIV/AIDS, memakan biaya besar, jika anggaran tidak memadai maka implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tidak akan berjalan maksimal. Selain itu kurangnya dukungan dari Masyarakat, Karena masyarakat masih banyak yang belum paham akan maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu belum sadar akan bahayanya apabila menderita penyakit HIV/AIDS bahkan masih ada yang belum tau apa itu HIV/AIDS. Sama halnya dengan penelitian oleh Endof Pudan Sembiring, Universitas Brawijaya yang berjudul “Implementasi Perda No.14 Tahun 2008 mengenai Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang (Studi tentang Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik)” yang juga ditemukan hambatan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari Kebijakan Peraturan Daerah tersebut dan juga pengetahuan mengenai penyakit menular HIV/AIDS. Maka dari itu untuk mengatasi hambatan yang ada seperti sumber daya anggaran dan kurangnya dukungan dari masyarakat diperlukan, Perencanaan yang Matang Mengenai Anggaran untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan selain itu mengadakan sosialisasi dan edukasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal ditandai dengan jumlah penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Sorong yang mengalami peningkatan di Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan dengan teori Van Meter dan Van Horn, menemukan satu dimensi yang menjadi penyebab Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS belum berjalan dengan optimal yaitu dimensi sumber daya yang terdiri dari indikator sumber daya anggaran, terjadinya pengurangan anggaran di Tahun 2021, dikarenakan terjadinya refocusing anggaran, yang mana di Tahun 2020 anggaran lebih banyak dikeluarkan dan difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi virus COVID-19, sehingga anggaran yang didapatkan di Tahun 2021 itu menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan tidak semuanya kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terlaksana seperti Pengobatan terhadap pengidap HIV, Pelayanan Terapi ARV (Anti Retro Viral), Perawatan dan juga Pengadaan Vitamin, Suplemen, dan juga Susu, Karena dari semua kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibutuhkan anggaran yang mencukupi dikarenakan jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sorong yang tergolong banyak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya ketika melaksanakan penelitian dilapangan. Penelitian ini juga mengalami keterbatasan data dikarenakan database yang terbaru masih dirancang.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari penelitian ini masih temuan awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Sorong untuk menemukan hasil yang lebih luas dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, juga lembaga tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu dan keterampilan yang telah penulis dapatkan serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggina, Yani. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penanggulangan HIV / AIDS Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018." *Jurnal Kesehatan Andalas* 8, no. 2 (2019): 385–93.
- Ngadnan. "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan HIV Dan AIDS." *Jurnal Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016): 1–98.
- Sembiring, Endof. "Implementasi Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Kabupaten Malang (Studi Tentang Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik)." *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 1, no. 3 (2013): 183–91.
- Hardani Ahyar. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.